

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep.427 -BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI HASIL
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah hasil pengadaan Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Agustus 2022

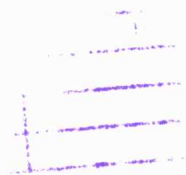
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.7 /Kep4 2 7-BKAD /2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022
TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2021 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH DARI HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2021
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	BANGUNAN GEDUNG	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	ASET TIDAK BERWUJUD	NON KAPITALISASI	JUMLAH TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN	-	28.088.566.810,00	15.532.755.803,00	2.087.793.000,00	156.748.230,00	-	-	3.409.238.925,00	49.275.102.768,00
2	DINAS KESEHATAN	-	10.574.181.417,00	4.020.199.922,00	3.408.944.798,00	-	385.000.000,00	-	434.255.753,00	18.822.581.890,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED	-	37.789.445.768,00	7.725.476.389,00	902.388.949,00	4.833.420,00	-	-	52.083.000,00	46.474.227.526,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN	264.700.000,00	21.811.189.268,00	1.074.005.000,00	325.200.000,00	76.000.000,00	1.355.063.300,00	115.500.000,00	190.242.402,00	25.211.899.970,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.403.805.287,00	1.359.743.144,00	2.091.522.676,00	140.550.471.739,00	-	5.645.303.479,00	-	4.782.000,00	153.055.628.325,00
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	135.002.000,00	95.697.000,00	5.233.265.204,00	-	-	-	-	5.463.964.204,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	53.600.000,00	-	-	-	-	-	-	53.600.000,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	74.465.000,00	33.067.000,00	-	-	-	32.700.000,00	-	140.232.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	155.914.400,00	-	-	-	-	-	621.000,00	156.535.400,00
10	DINAS SOSIAL	-	251.900.000,00	-	-	-	-	-	5.415.000,00	257.315.000,00
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	-	72.251.000,00	-	-	-	-	49.739.800,00	1.115.000,00	123.105.800,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	124.399.244,00	-	-	-	-	-	-	124.399.244,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	1.084.538.500,00	1.323.428.291,00	2.639.476.000,00	-	12.414.330.000,00	294.558.000,00	59.572.918,00	17.815.903.709,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	2.309.224.700,00	-	-	-	-	-	-	2.309.224.700,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	47.438.900,00	-	-	-	-	-	-	47.438.900,00
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	469.935.800,00	1.266.277.769,00	-	-	-	-	-	1.736.213.569,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	-	2.556.064.903,00	779.226.050,00	113.018.752,00	-	-	-	3.046.952.640,00	6.495.262.345,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	109.451.600,00	-	-	-	-	133.395.000,00	375.000,00	243.221.600,00
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	31.903.300,00	-	-	-	-	-	-	31.903.300,00
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	182.704.500,00	151.068.450,00	32.367.500,00	-	-	479.648.000,00	-	845.788.450,00
21	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	-	120.898.000,00	503.327.000,00	-	-	-	-	-	624.225.000,00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	265.982.000,00	467.832.000,00	-	-	2.779.247.928,00	-	-	3.513.061.928,00

NO	SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	BANGUNAN GEDUNG	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	ASET TIDAK BERWUJUD	NON KAPITALISASI	JUMLAH TOTAL
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	31.749.300,00	-	-	195.362.450,00	-	-	26.831.200,00	253.942.950,00
24	DINAS PERTANIAN	-	92.859.700,00	-	-	-	-	-	6.700.000,00	99.559.700,00
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	751.687.000,00	197.166.000,00	-	-	22.697.934.946,00	213.430.000,00	1.594.000,00	23.861.811.946,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	-	1.083.456.000,00	-	-	-	-	-	44.980.000,00	1.128.436.000,00
27	SEKRETARIAT DPRD	-	1.956.034.000,00	-	-	-	-	-	11.140.000,00	1.967.174.000,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	327.752.100,00	47.250.000,00	-	-	-	1.464.913.100,00	-	1.839.915.200,00
29	PPKD	10.122.344.823,00	-	1.016.022.800,00	16.509.873.050,00	-	-	-	-	27.648.240.673,00
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	269.813.500,00	166.684.561,00	-	-	-	-	401.500,00	436.899.561,00
31	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	419.952.300,00	-	-	-	-	-	10.647.000,00	430.599.300,00
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	299.344.600,00	203.850.000,00	-	-	-	96.690.000,00	1.144.000,00	601.028.600,00
33	INSPEKTORAT	-	763.228.000,00	-	-	-	-	99.651.200,00	12.898.000,00	875.777.200,00
34	KECAMATAN WALED	-	55.790.300,00	112.050.000,00	-	-	-	-	-	167.840.300,00
35	KECAMATAN CILEDUG	-	21.329.300,00	-	-	-	-	-	-	21.329.300,00
36	KECAMATAN LOSARI	-	25.007.300,00	-	-	-	-	-	-	25.007.300,00
37	KECAMATAN PABEDILAN	-	16.836.900,00	-	-	-	-	-	-	16.836.900,00
38	KECAMATAN BABAKAN	-	10.438.300,00	-	-	-	-	-	-	10.438.300,00
39	KECAMATAN GEBANG	-	37.834.300,00	-	-	-	-	-	-	37.834.300,00
40	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	525.628.000,00	33.368.300,00	-	-	-	-	-	2.200.000,00	561.196.300,00
41	KECAMATAN LEMAHABANG	-	8.802.500,00	-	-	-	-	-	445.000,00	9.247.500,00
42	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	-	19.837.700,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	34.837.700,00
43	KECAMATAN SEDONG	-	7.392.300,00	-	-	-	-	-	-	7.392.300,00
44	KECAMATAN ASTANAJAPURA	-	8.504.300,00	-	-	-	-	-	-	8.504.300,00
45	KECAMATAN PANGENAN	-	17.342.700,00	-	-	-	-	-	946.000,00	18.288.700,00
46	KECAMATAN MUNDU	-	28.145.500,00	110.240.328,00	-	-	-	-	-	138.385.828,00
47	KECAMATAN BEBER	-	27.262.700,00	-	-	-	-	-	15.112.900,00	42.375.600,00
48	KECAMATAN TALUN	-	24.317.100,00	-	-	-	-	-	7.400.000,00	31.717.100,00
49	KECAMATAN SUMBER	-	227.766.200,00	433.099.850,00	2.414.641.150,00	-	-	-	217.389.000,00	3.292.896.200,00
50	KECAMATAN DUKUPUNTANG	-	75.589.100,00	-	-	-	-	-	-	75.589.100,00
51	KECAMATAN PALIMANAN	-	23.071.700,00	15.000.000,00	-	-	-	-	1.912.000,00	39.983.700,00
52	KECAMATAN PLUMBON	-	37.968.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	52.968.000,00
53	KECAMATAN DEPOK	-	37.449.100,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	52.449.100,00
54	KECAMATAN WERU	-	36.199.300,00	-	-	-	-	-	-	36.199.300,00
55	KECAMATAN KEDAWUNG	-	23.192.100,00	-	-	-	-	-	-	23.192.100,00
56	KECAMATAN GUNUNGJATI	-	18.959.800,00	-	-	-	-	-	-	18.959.800,00
57	KECAMATAN KAPETAKAN	-	23.528.300,00	-	-	-	-	-	1.480.000,00	25.008.300,00
58	KECAMATAN KLANGENAN	-	14.076.100,00	-	-	-	-	-	-	14.076.100,00
59	KECAMATAN ARJAWINANGUN	-	30.772.300,00	-	-	-	-	-	-	30.772.300,00

NO	SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	BANGUNAN GEDUNG	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERRJAAN	ASET TIDAK BERWUJUD	NON KAPTALISASI	JUMLAH TOTAL
60	KECAMATAN PANGURAGAN	-	26.565.300,00	-	-	-	-	-	-	26.565.300,00
61	KECAMATAN CIWARINGIN	-	28.404.500,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	43.404.500,00
62	KECAMATAN SUSUKAN	-	26.681.200,00	104.200.000,00	-	-	-	-	478.000,00	131.359.200,00
63	KECAMATAN GEGESIK	-	42.798.900,00	-	-	-	-	-	-	42.798.900,00
64	KECAMATAN KALIWEDI	-	6.866.500,00	-	-	-	-	-	-	6.866.500,00
65	KECAMATAN KARANGWARENG	-	14.287.300,00	-	-	-	-	-	-	14.287.300,00
66	KECAMATAN TENGAH TANI	-	23.730.000,00	-	-	-	-	-	-	23.730.000,00
67	KECAMATAN GEMPOL	-	23.015.600,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	38.015.600,00
68	KECAMATAN PASALEMAN	-	40.511.100,00	-	-	-	-	-	8.360.000,00	48.871.100,00
69	KECAMATAN PLERED	-	45.684.400,00	104.000.000,00	-	-	-	-	1.724.000,00	151.408.400,00
70	KECAMATAN PABUARAN	-	1.848.300,00	-	-	-	-	-	-	1.848.300,00
71	KECAMATAN GREGED	-	56.826.300,00	-	-	-	-	-	5.491.000,00	62.317.300,00
72	KECAMATAN JAMBLANG	-	11.811.300,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	26.811.300,00
73	KECAMATAN SURANENGGA	-	28.459.500,00	-	-	-	-	-	-	28.459.500,00
74	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	84.582.600,00	198.300.000,00	-	-	-	-	-	282.882.600,00
TOTAL		14.316.478.110,00	115.017.531.054,00	37.861.746.889,00	174.217.440.142,00	432.944.100,00	45.276.879.653,00	2.980.225.100,00	7.583.927.238,00	397.687.172.286,00

BUPATI CIREBON,


IMRON